

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar N. D, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, Diana Koetnoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Indonesia, Bogor.
- Haris, Freddy, 2007, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat
- Mahja, Djuhad, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Redaksi, Tim, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- Tedjosaputra, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Tesis

Fitriningrum, Indah, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris di Kedu Utara*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Gadjah Mada, Yogyakarta

Kurniawansyah, Dani, *Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1209)

D. Internet

Herman, 2011, “Pengawasan terhadap Notaris”, <http://herman-notary.blogspot.com/2011.01/pengawasan-terhadap-notaris-terhadap.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Sejarah Sumatera Selatan, <https://sumselprov.go.id/sejarah>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Wilayah Administrasi Sumatera Selatan, <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43687/data--wilayah-administrasi-pemerintahan>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.